

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI PULAU KELUMU

Faizal Rahmat¹, Soleh Aprianto², Fazril Wahyudi S³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

Email: solehaprianto214@gmail.com

ABSTRACT

Education is a formal and informal learning process that involves teaching knowledge, skills, values, and norms to individuals through various methods and experiences. The research uses qualitative research methods, descriptive in type, as well as through literature review and literature review. The purpose of this paper is to understand the government's role in granting educational rights to sea tribe children on Kelumu Island, Lingga District. The Lingga District Government makes policies related to fulfilling the right to education such as PKBM and BOSDA (scholarships for underprivileged marine tribe children). Therefore, it was found that the policy had been designed and there were several implementers in it, but the public's awareness to fulfill the right to education in their area was lacking in the success of the existing policy. Fulfillment of this right is certainly necessary to be able to support the provision of jobs with an equitable education.

Keywords: *Education, Policy Evaluation, Children of the Sea Tribe.*

ABSTRAK

Pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran secara formal dan informal yang melibatkan proses mengajar dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada masing-masing individu melalui berbagai metode dan pengalaman. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, serta melalui cara studi pustaka dan tinjauan literatur. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami apa peran pemerintah dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak suku laut di Pulau Kelumu, Kabupaten Lingga. Pemerintah Kabupaten Lingga membuat kebijakan terkait pemenuhan hak pendidikan seperti PKBM dan BOSDA (beasiswa bagi anak suku laut yang kurang mampu). Oleh karena itu, ditemukan bahwa kebijakan telah dirancang dan terdapat beberapa orang pelaksana didalamnya, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak pendidikan di daerah mereka sendiri kurang dalam menyukseskan kebijakan yang sudah ada. Pemenuhan hak ini tentu diperlukan untuk dapat mendukung juga penyediaan lapangan pekerjaan dengan pendidikan yang sudah merata.

Kata kunci: Pendidikan, Evaluasi Kebijakan, Anak Suku Laut.

PENDAHULUAN

Modernisasi memberikan impact bagi seluruh aspek dalam kehidupan, termasuk juga salah satunya aspek pendidikan. Di mana, pendidikan dijadikan salah satu kunci keberhasilan di suatu negara (Salamun & Sauri, 2023). Pendidikan merupakan proses pembelajaran secara formal dan informal yang melibatkan proses pengajaran dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu melalui berbagai metode dan pengalaman. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan “Pendidikan nasional merupakan bentuk pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan responsif terhadap perubahan zaman”. Pada ayat 3 Sistem pendidikan nasional mencakup semua elemen pendidikan yang saling terhubung satu dengan yang lain secara komprehensif guna mencapai sasaran pendidikan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Suatu negara dan bangsa dapat dikatakan maju pada dasarnya sangat ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki oleh negara tersebut. Pendidikan menjadi faktor yang penting bagi generasi-generasi negara, dimulai dari pendidikan karakter yang dibangun oleh keluarga, dan pendidikan yang dilaksanakan di lingkup formal. Hanya bangsa yang mempunyai pendidikan karakter yang kuat guna menjadikan dirinya sebagai suatu bangsa yang maju dan bermartabat, serta disegani oleh bangsa lain. Pendidikan juga sangat penting untuk masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih baik dan maju. Pendidikan sepantasnya mengarahkan peserta didik ke arah pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.

Pulau Kelumu terletak di sebuah pulau Kabupaten Lingga, Indonesia, dan dihuni oleh masyarakat suku laut yang merupakan penduduk asli pulau tersebut. Di mana, masyarakat suku laut memiliki kehidupan dan budaya yang unik, tergantung

pada laut sebagai sumber kehidupan utama mereka. Namun, di tengah kehidupan yang terisolasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, anak-anak suku laut sering menghadapi tantangan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Terpencilnya wilayah Pulau Kelumu dan aksesibilitas yang terbatas menjadi hal utama dalam kesulitan memenuhi hak pendidikan anak suku laut. Pulau ini mungkin memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jalan, transportasi, atau fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, perbedaan budaya dan kebiasaan hidup antara suku laut dan masyarakat di luar pulau juga dapat memengaruhi pendekatan yang diperlukan dalam memenuhi hak pendidikan anak suku laut.

Pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu sangat penting karena memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Pendidikan yang layak tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak suku laut, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih baik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks ini, upaya negara dalam peran pemerintahan perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan budaya suku laut, melibatkan komunitas suku laut dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, serta memberdayakan anak suku laut melalui pendidikan formal dan nonformal. Melalui langkah-langkah kebijakan yang diatur oleh pemerintah, diharapkan dapat tercapai pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu, Kabupaten Lingga.

Kebijakan pemerintah dalam masalah pendidikan di Pulau Kelumu menjadi isu yang akan diangkat dalam penelitian ini. Minimnya pendidikan seharusnya membangkitkan kinerja pemerintah dalam membuat peraturan untuk pemenuhan hak anak-anak suku laut untuk menempuh pendidikan di wilayahnya sendiri tanpa harus melanjutkan di wilayah lain.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan “Bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak suku laut Pulau Kelumu?”. Tujuan penelitian ini selain untuk

mengetahui jawaban dari pertanyaan rumusan masalah secara garis besar, juga untuk sebagai pengumpulan data terkait kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak-anak yang berada sebagai masyarakat suku laut. Penelitian ini juga ingin melihat apakah kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lingga terealisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Winsherly Tan (2021) dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut Di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga”. Hasil penelitian ini yaitu pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu, Kabupaten Lingga masih belum dapat dikatakan efektif secara signifikan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu: *Pertama*, faktor dari masyarakat suku laut sendiri. Masyarakat setempat pada kenyataannya belum sadar akan pentingnya pendidikan. *Kedua*, faktor sarana, dikarenakan belum lengkap akan ketersediaan sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Pulau Kelumu, serta belum tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari suku laut sendiri sehingga hal tersebut membuat masyarakat suku laut tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah. *Ketiga* yaitu, budaya perkawinan di bawah umur yang sudah membudaya. *Keempat*, hanya tersedia Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pulau Kelumu sehingga ketika ingin menempuh pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, mereka harus keluar dari pulau tersebut untuk melanjutkan pendidikan di wilayah lain. *Kelima*, tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi suku laut sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk melanjutkan sekolah karena pada akhirnya mereka akan kembali menjadi nelayan dan bekerja memotong kayu.

Begitu juga dari penelitian terdahulu oleh Alfianni Nayangsari (2022) dengan judul penelitian “Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Suku Laut Di Desa Kelumu Kabupaten Lingga”. Hasil penelitian ini yaitu implementasi strategi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lingga saat ini yaitu merujuk ke visi misi Kabupaten Lingga tentang pemerataan pendidikan formal untuk semua anak-anak pada semua golongan. Beberapa program yang dijalankan saat ini mencakup ke semua golongan bukan hanya untuk anak suku

laut. Akan tetapi, implementasi strategi pemerintah untuk anak-anak suku laut dirasa masih sangat kurang karena ada beberapa kendala seperti tidak adanya transportasi menuju ke sekolah dan juga kebijakan pemerintah daerah dirasa belum cukup untuk sampai ke anak-anak suku laut.

Menurut Artha Mahindra Diputera, dkk (2022) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Prototipe untuk Pendidikan Anak Usia Dini”. Hasil penelitian ini yaitu adanya penyatuan berbagai salinan dokumen kebijakan dan kajian penelitian terkait kurikulum prototipe dan profil pelajar pancasila. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Pelajar Pancasila memiliki sejumlah karakteristik primer, yaitu, beriman, bertakwa pada yang kuasa yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan dunia, berdikari bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif (Diputera et al., 2022a)

Para peneliti memberikan pendapat yang berbeda dari segi faktor-faktornya. Menurut Winsherly ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam belum efektifnya pendidikan untuk anak suku laut di pulau kelumu yaitu faktor masyarakat, sarana, budaya perkawinan, hanya tersedia sekolah dasar (SD), tidak adanya lapangan pekerjaan. Sama halnya dengan menurut Alfianni Nayangsari yang menjelaskan mengenai implementasi strategi yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Lingga saat ini yaitu merujuk ke visi misi kabupaten lingga tentang pemerataan pendidikan formal untuk semua anak-anak pada semua golongan, namun masih kurang terealisasikan implementasi strategi tersebut karena serupa dengan faktor di penelitian Winsherly yaitu adanya penghambat seperti sarana transportasi untuk menempuh pendidikan. Sedangkan pada penelitian Artha Mahindra Diputera yang menjelaskan kebijakan pemerintah yang membangun kurikulum guna penyatuan atas sebuah program penggerak berasaskan Pancasila bagi pendidikan karakter.

Dengan kerangka teori dari penelitian ini, yaitu:

A. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan dengan baik atau tidak dan dapat

diimplementasikan. Evaluasi merupakan sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan (Prabowo et al., 2022a).

Menurut James Anderson dalam Winarno (2014:166), evaluasi kebijakan terbagi menjadi tiga tipe, di mana tipe-tipe ini dipaparkan berdasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, yaitu: a. Tipe pertama dipahami sebagai kegiatan fungsional, dimaksudkan evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. b. Tipe kedua menitikberatkan diri pada sistem kebijakan atau program-program yang ada. Tipe ini lebih fokus ke arah seperti kejujuran atau adanya efisiensi dalam melakukan berbagai kegiatan. c. Tipe ketiga yaitu evaluasi kebijakan sistematis, di mana melihat dengan cara objektif pelaksanaan berbagai program kebijakan yang sudah dijalankan, agar dapat terukur dampak bagi masyarakat dan terlihat seperti apa tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

B. Hak Pendidikan

Hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat murni dan menyeluruh sebagai bentuk dari karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengertian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 telah menjelaskan secara rinci mengenai hak asasi manusia, yang diantaranya ialah hak untuk hidup, berkeluarga, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan memperoleh pendidikan. Pada dasarnya di Indonesia pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk dapat merasakannya. Pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi diri melalui proses suatu pembelajaran (Nadziroh et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari

penelitian deskriptif ini yaitu membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang evaluasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak suku laut Pulau Kelumu (Savira & Suharsono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketiga tipe yang diteorikan oleh James Anderson, jika disesuaikan dalam penelitian ini, tipe yang sesuai adalah tipe yang ketiga yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis. Adapun indikator dari evaluasi menurut Dunn antara lain yang *pertama* efektivitas sebagai hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai tujuan, *kedua*, kecukupan, merupakan dari hasil yang efektif apakah memperoleh pemecahan masalah yang cukup. Dan yang *ketiga*, penerapan, apakah adanya biaya dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat secara merata. *Keempat*, tanggung jawab, di mana hasil dari 5 kebijakan memiliki nilai yang dapat memuaskan sekelompok masyarakat yang menerima kebijakan. *Kelima*, ketetapan, pencapaian dari hasil yang didapatkan bermanfaat.

Efektivitas

Tujuan atas pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu dinilai masih kurang untuk mencapai efektivitas dari indikator evaluasi kebijakan. Di Kelumu pendidikan dapat digolongkan masih minim dikarenakan beberapa faktor-faktor. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pendidikan di Pulau Kelumu. Karena pernikahan di usia dini berdampak negatif pada pendidikan seseorang yang memutuskan untuk berhenti sekolah, hal itu yang menyebabkan pendidikan di Pulau Kelumu menjadi tidak efektif. Selain pernikahan dini, akses pendidikannya juga kurang salah satunya adalah dikarenakan adanya faktor kemiskinan masyarakat di Pulau Kelumu yang masih hidup dalam kondisi yang kurang mampu. Masyarakat tersebut yang seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk juga pendidikan. Seperti, biaya sekolah, peralatan, dan biaya hidup. Akibatnya, anak-anak dari keluarga yang

kurang mampu terpaksa bekerja atau tidak menyambung pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan kemudian memutuskan untuk menikah di usia yang dini.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Cara ini dilakukan untuk dapat mengelola, mengendalikan pelaksanaan pendidikan karakter di lingkup Dinas Pendidikan di setiap kabupaten/kota. Monitoring dan evaluasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan program pendidikan khususnya pendidikan karakter secara periodik setiap tahun dan lima tahunan (Muchtar & Suryani, 2019).

Dilihat dari prinsip memonitoring yang dilakukan dalam kegiatan ini, bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses dalam mencapai tujuan sesuai dengan rencana atau tidak. Maka, monitoring harus dilakukan dengan benar guna memastikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan apakah ada dalam jalurnya yang sesuai terhadap pedoman serta penyusunan rencana serta mampu memberikan sebuah informasi terhadap pengelola program dan apabila terjadi sesuatu seperti tantangan atau penyimpangan dan selaku masukan untuk mengadakan evaluasi (Azam Jaysurrohman et al., 2021).

Kecukupan

Ketidacukupan atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sosial, ketidakadilan, dan kemiskinan. Secara keseluruhan, kecukupan merujuk pada kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki akses dan pemenuhan yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka, baik secara materi maupun non-materi, untuk menjalani hidup yang layak. Kecukupan atas pemenuhan kebutuhan esensial seperti transportasi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jarak dan akses yang sulit menjadi alasan para siswa tidak melanjutkan pendidikan. Seperti yang diketahui di Kelumu siswa SMP dan SMA yang ingin menempuh pendidikan harus menempuh jalur laut yang mana mereka menggunakan sampan dan hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kalangan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu akses yang tidak memadai karena keterbatasan transportasi tidak memenuhi

indikator kecukupan dari evaluasi kebijakan. Penerapan dari pemerataan tujuan untuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan tidak dipungut bagi jenjang SD dan SMP.

Penerapan

Penerapan adalah mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang direncanakan dan disusun sebelumnya. Penerapan dari pemerataan tujuan untuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan tidak dipungut bagi jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 pasal 12 (3) tentang wajib belajar di mana program wajib belajar 9 tahun yang diatur untuk menggratiskan anak-anak yang membutuhkan pemenuhan pendidikan.

Responsibilitas

Responsibilitas mencerminkan tanggung jawab yang dimiliki terhadap tindakan, keputusan, atau hasil dari pekerjaan atau peran yang diemban. Setiap individu atau kelompok memiliki responsibilitas yang berbeda tergantung pada konteksnya. Pada indikator responsibilitas, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dan program yang diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan hak pendidikan di daerah kelumu yaitu program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang bertujuan memperluas kesempatan serta wawasan warga masyarakat. Selain itu ada juga program BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada jenjang sekolah. Namun dalam pelaksanaan program-program di atas masih belum sepenuhnya membuat anak-anak di daerah Kelumu menjalani pendidikan seperti yang diharapkan pemerintah, hal itu dikarenakan karakteristik anak-anak suku laut di daerah Kelumu berbeda dengan anak-anak pada umumnya, di mana anak-anak suku laut tersebut masih mengedepankan kebudayaan dan mengesampingkan pendidikan. Latar belakang kebudayaan dan tradisi juga menjadi salah satu faktor belum maksimalnya program itu dilaksanakan.

Ketetapan

Ketetapan umumnya digunakan dalam konteks hukum atau administrasi publik. Ketika sebuah lembaga atau otoritas mengeluarkan sebuah ketetapan, maka keputusan tersebut menjadi hukum atau aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang terkait. Ketetapan juga dapat berlaku retroaktif, artinya dapat memiliki efek terhadap peristiwa atau tindakan yang telah terjadi sebelumnya. Dalam indikator ketetapan, pemerintah telah menjalankan dan mengimplementasikan program PKBM dan BOSDA kepada masyarakat suku laut di daerah Kelumu. Maka dari indikator ini program yang dijalankan pemerintah dapat terlihat sudah membuat keputusan yang mengusahakan tindakan pemenuhan hak pendidikan. Ketetapan keputusan dibuat agar dapat dipatuhi oleh pihak yang terkait. Pada dasarnya program ini membutuhkan dukungan dan keterbukaan dari masyarakat agar terlaksana secara maksimal program pemerintah tersebut.

Dari indikator-indikator evaluasi kebijakan jika dilihat dengan realisasi masyarakat, mereka kurang menerima dan kurang menyadari pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak suku laut. Karena menurut peneliti kebijakan yang digencarkan oleh pemerintah juga pada dasarnya harus didukung oleh kesadaran dari masyarakat Pulau Kelumu. Kesadaran untuk selain memenuhi hak pendidikan, kebijakan yang ada justru dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kriteria tercukupinya lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan di daerah terpencil seperti Pulau Kelumu.

KESIMPULAN

Dengan adanya program pemerintah memberikan akses dan pemenuhan yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka, baik secara materi maupun non-materi, untuk menjalani hidup yang layak. Kecukupan atas pemenuhan kebutuhan esensial seperti transportasi juga sangat penting untuk pendidikan karena memudahkan mereka untuk menempuh perjalanan ke sekolah mereka yang berpengaruh kepada pendidikan masyarakat suku laut di Desa Kelumu. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak kepada anak-anak suku laut untuk wajib belajar.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan usaha kebijakan yang telah diatur pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan anak suku laut menyebabkan turunnya mutu pendidikan di Pulau Kelumu. Menjadikan kebijakan yang diatur oleh pemerintah kurang efektif untuk mendapatkan capaian hasil dari tujuan memenuhi hak anak-anak suku tersebut. Dalam evaluasinya, kebijakan yang dijalankan sudah mengusahakan seperti indikator-indikator yang ada, namun memang pada dasarnya kurangnya penerimaan dari masyarakat untuk menjalankan dan menerapkan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Madani, F., Ishaq, M., Purwito, L., & Permata Sari, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1143. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.1143-1154.2022>
- Azam Jaysurrohman, R., Supandi, M., Tedi Wardani, M., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). PROBLEMATIKA DALAM EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. In *BINTANG : Jurnal Pendidikan dan Sains* (Vol. 3, Issue 2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>
- Diputera, A. M., Damanik, S. H., & Wahyuni, V. (2022b). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Prototipe untuk Pendidikan Anak Usia Dini* (Vol. 8, Issue 1).
- Fadila, R., & Ramadan, Z. H. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Hasil Belajar. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.256>
- Farozi, N. (n.d.). *EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMAN KOTA BENGKULU*.

- Firmansyah, E., & Rizal Masdul, M. (2022). IMPLEMENTASI PIAUD TERHADAP ANAK-ANAK SUKU KAILI PEDALAMAN DI DESA KALORA KABUPATEN SIGI. *Research and Development Journal Of Education*, 8(1), 386–390. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.13758>
- Hayi, A., & Alwi, M. (n.d.). *FITRAH Jurnal Studi Pendidikan ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DI ERA REFORMASI*. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.447>
- Herman, H., & Anhusadar, L. (2022). Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2665–2676. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2266>
- Jurnal*, 1(1), 287–290.
- Keadilan*, 9(3), 560–572. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.948>
- Khairani Nasution, M. S. (n.d.). EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH ALIYAH AL HUDA PANGKALAN SUSU. In *Jurnal Pendidikan dan Keislaman* (Vol. 144, Issue 1).
- LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA. *Student Online*
- Layla, M., Zola, A., Fitri, D. S., Puspita, E., Three, E., Ridwan, M., Arhafizh, M., Nuraida, N., Octaviani, S., Lisnawati, L., Safina, S., & Mahindra, Y. (2022). Metode Visual, Auditorial dan Kinestetik dalam Meningkatkan Mutu Belajar Anak Suku Laut Kawal Pantai. *JPPM Kepri Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 2(2), 118–125. <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v2i2.441>
- Marisa Elsara. (n.d.). *IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMBERDAYAAN SUKU LAUT DI DUSUN LINAU BATU, DESA TANJUNGKELIT, KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPRI*.
- Marzuki, I., & Hakim, L. (n.d.). EVALUASI PENDIDIKAN ISLAM. In 77) *Tadarus Tarbawy* (Vol. 1, Issue 1).

- Mega Sari, R., El Widdah, M., Rozelin, D., & Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, I. (n.d.). *Pola Pengajaran Agama Islam Dalam Keluarga Suku Laut Melayu di Pulau Lipan Desa Penuba*.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Mohd Muizzuddin Mohd Nor, M. F. S. N. M. N. (n.d.). *Kesadaran pendidikan dan minat kerja pelajar Orang Asli suku kaum Jakun di Rompin, Pahang*.
- Mohd Zaidi Bin Haji Mohd Zeki, A. Z. B. A. R. Abd. Razak. (n.d.). *CABARAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH PEDALAMAN: BERSEDIKAH DALAM MELAKSANAKAN KBAT?*
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50–57.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.142>
- Muhammad, O. :, Febrianto, R., & Yogyakarta, U. N. (2023). DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI COVID-19 DI SMA NEGERI 5 PURWOREJO THE DYNAMICS OF EDUCATION POLICY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SMA NEGERI 5 PURWOREJO. In *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* (Vol. 12, Issue 2).
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SDAn*, 4(3), 400–405.
- Nayangsari, A., Muhammad, A. S., Setiawan, R., Raja, M., & Haji, A. (n.d.). *MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA*.
- Nayangsari, Alfianni, Adji Suradji Muhammad, R. S. (2022). MANAJEMEN
Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022b). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901–907. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>

- Riani, K. H. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR (WAJIB BELAJAR 9 TAHUN) ANAK SUKU LAUT DI DESA BERAKIT KAMPUNG PANGLON KECAMATAN TELUK SEBONG*.
- Rifa', A. A., & Tarbiyah, F. (2018). Pendidikan Anak dalam Islam: Upaya Mempersiapkan Generasi Masa Depan Berakhlak Mulia. In *Desember* (Vol. 4, Issue 2).
- Ryan Puan Renna, H., & Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, S. (2022). Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua. In *Jurnal Papeda* (Vol. 4, Issue 1).
- Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859>
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2019). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU
- Tan, W. (2021). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI PULAU KELUMU KABUPATEN LINGGA. *IUS Kajian Hukum Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 19 Zitteliana 159 (2003). *Bisnis Ritel - Ekonomi*
- Yanto, M. (2022). *PERAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK KARAKTER SUKU ANAK DALAM DESA MUARA TIKU*. 15(1).